



Penyerahan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2019
Pemprov Jabar Kembali Raih WTP

Bandung – Humas dan TU Perwakilan

Selasa (30/06), Setelah BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019 secara daring kepada 27 entitas pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Jawa Barat dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat. LHP disampaikan langsung oleh **Anggota V BPK - Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA, CIPM, CSFA, CPA**, dengan didampingi oleh **Auditor Keuangan Negara V BPK – Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CFE., CMA., CPA, CSFA, CA** dan **Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat - Arman Syifa, M.Acc., Ak., CA., CSFA.**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat TA 2019, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berhasil mempertahankan Opini WTP untuk yang ke-9 kalinya, sekaligus pada tahun ini untuk pertama kalinya seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat memperoleh opini WTP.

BPK menemukan sembilan kelemahan pengendalian intern dan delapan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan Tahun 2019. Permasalahan tersebut antara lain terkait penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal yang belum sesuai ketentuan, penatausahaan Aset Tetap yang belum sepenuhnya tertib, pemanfaatan Barang Milik Daerah yang belum dilakukan secara memadai, serta kelebihan pembayaran pada beberapa pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 – 2019, untuk posisi Semester II 2019, dari 2.123 rekomendasi senilai Rp406,88 Miliar yang telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebanyak 1.362 rekomendasi senilai Rp271,81 Miliar telah selesai ditindaklanjuti atau tingkat penyelesaian mencapai 64,15%, sehingga masih terdapat sebanyak 761 rekomendasi (35,85%) senilai Rp135,06 Miliar yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti. Pimpinan dan Anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP sesuai dengan kewenangannya, serta dapat mengusulkan pertemuan konsultasi apabila memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP.

Dalam kesempatan ini, pertama kalinya BPK juga menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat bersamaan dengan LHP atas LKPD TA 2019. Ikhtisar tersebut menyajikan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2018, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu Tahun 2019 pada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang berisi gambaran permasalahan signifikan atas tema-tema tersebut. IHPD ini dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan dalam hal pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota. (**/humas bpk)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Contact Person :

Dwi Hendianto (humas.jabar@bpk.go.id)
Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat